

## **STRATEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ZONASI JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KECAMATAN BANDUNG WETAN KOTA BANDUNG**

**Natasha Putri Ayu Gusdianie<sup>a</sup> dan Deddy Mulyadi<sup>b</sup>**

<sup>a,b</sup>Politeknik STIA LAN Bandung

e-mail : <sup>a</sup>natashaputriayug@gmail.com, <sup>b</sup>demul010@gmail.com

### **Abstrak**

Kebijakan zonasi di Kota Bandung telah diterapkan sejak tahun 2016 dan implementasinya didasarkan kepada Peraturan Walikota Bandung yang ditetapkan setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan merumuskan strategi dari implementasi kebijakan zonasi jenjang sekolah menengah pertama di Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung. Metode penelitian kualitatif dengan teknik studi dokumen, wawancara, dan media. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan zonasi jenjang sekolah menengah pertama di Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung dalam implementasinya sudah tepat dari aspek ketepatan kebijakan namun jika melihat tujuannya masih terdapat beberapa tujuan yang belum tercapai dengan baik yaitu pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan, sedangkan tujuan mendekati lingkungan sekolah dengan keluarga dan menghilangkan label favorit dan non-favorit sudah tercapai dengan baik. Dari aspek ketepatan pelaksana kebijakan ini sudah tepat yaitu Dinas Pendidikan Kota Bandung dan SMP Negeri yang berada di Kecamatan Bandung Wetan sudah menjalankan perannya dengan baik. Dari aspek ketepatan sasaran belum tercapai dengan baik hal ini dilihat dari ketidaksesuaian target kebijakan dan masih terdapat orang tua siswa yang kurang memahami kebijakan zonasi terutama pendaftaran penerimaan peserta didik baru. Dari aspek ketepatan lingkungan dapat dikatakan belum tepat karena masih terdapat ketimpangan antara kondisi wilayah dan ketersediaan sekolah menengah pertama negeri. Adapun strategi prioritas yang dirumuskan untuk memperbaiki implementasi kebijakan zonasi yaitu strategi ST (Kekuatan-Ancaman) dengan memanfaatkan kekuatan untuk menghindari ancaman atau strategi diversifikasi, dengan rumusan strategi: 1) Pembuatan peraturan dengan memberi kembali jalur akademik, 2) Intensifikasi kegiatan sosialisasi pada masyarakat tidak hanya dengan media-media sosial tetapi dengan infografis, 3) Pengkajian dan evaluasi kembali Peraturan Walikota No. 57 Tahun 2021, khususnya tentang ketentuan yang menyangkut sasaran sekolah dan siswanya.

**Kata Kunci:** Zonasi, Implementasi Kebijakan, dan Strategi.

## **STRATEGY IMPLEMENTATION OF ZONATION POLICY FOR THE JUNIOR HIGH SCHOOL IN THE DISTRICT OF EAST BANDUNG, BANDUNG CITY**

### **Abstract**

*The zoning policy in Bandung City has been implemented since 2016 and its implementation is based on the Bandung Mayor Regulation which is set annually. This study aims to analyze implementation and formulate strategies for implementing zoning policies for junior high school levels in Bandung East District, Bandung City. Qualitative research methods with document study techniques, interviews, and media. The results showed that the zoning policy for junior high school levels in Bandung East District, Bandung City, in its implementation was appropriate from the aspect of policy accuracy, but if you look at the objectives there are still some goals that have not been achieved properly, namely equal distribution of education and improving the quality of education, while the goal of bringing the school environment closer to family and eliminating favorite and non-favorite labels is*

well accomplished. From the aspect of accuracy, the implementation of this policy is correct, namely the Bandung City Education Office and State Junior High Schools in Bandung East District have carried out their roles well. From the aspect of target accuracy, this has not been achieved properly, this can be seen from the discrepancy of the policy targets and there are still parents who do not understand the zoning policy, especially the registration of new student admissions. From the aspect of environmental accuracy, it can be said that it is not right because there is still an imbalance between regional conditions and the availability of state junior high schools. The priority strategies formulated to improve the implementation of zoning policies are the ST (Strength-Threats) strategy by utilizing strengths to avoid threats or diversification strategies, with the formulation of strategies: 1) Making regulations by giving back academic pathways, 2) Intensification of socialization activities in the community does not only with social media but with infographics, 3) Review and re-evaluate Mayor Regulation no. 57 of 2021, in particular regarding the provisions concerning the target of schools and their students.

**Keywords:** Zonation, Policy Implementation, and Strategy.

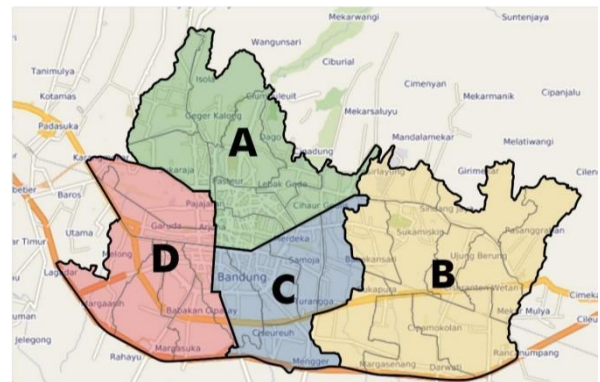
### A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang melakukan peningkatan kualitas masyarakat, dengan sumber daya manusia menjadi elemen penting untuk menunjang pembangunan demi terciptanya negara yang lebih maju. Peningkatan kualitas masyarakat ini salah satunya dilakukan dengan cara menyelenggarakan pendidikan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan nasional merupakan pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Pendidikan di Indonesia dimulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama, pendidikan menengah atas, hingga perguruan tinggi. Dalam menyelenggarakan pendidikan pada tahap awal dilakukan penerimaan peserta didik baru yang selanjutnya disingkat PPDB. Penerimaan peserta didik baru adalah proses penerimaan peserta didik yang dilaksanakan pada tahun ajaran baru dengan berlandaskan kepada Permendikbud No. 1 Tahun 2021 yang berlaku bagi seluruh kota maupun kabupaten di Indonesia. Salah satu kotanya yaitu Kota Bandung yang merupakan ibukota dari Provinsi Jawa Barat. Kota Bandung dijuluki Kota Kembang merupakan Kota metropolitan terbesar di Jawa Barat.

Penerimaan peserta didik baru di Kota Bandung diatur dalam Peraturan Wali Kota Bandung No.57 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta

Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama. Dalam penerimaan peserta didik baru memiliki empat jalur untuk melakukan pendaftaran. Salah satu jalur yang mendominasi dalam pendaftaran penerimaan peserta didik baru yaitu jalur zonasi dengan kuota paling sedikit 50% dari daya tampung sekolah. Penempatan zona ini terbagi menjadi empat zona yaitu zona A, B, C, dan D yang wajib diketahui oleh calon siswa dan orang tua.



Gambar 1

Tertuang dalam Peraturan Wali Kota Bandung No. 57 Tahun 2021 terkait zona penerimaan peserta didik didalamnya terdapat daftar Kecamatan pada setiap zona dan daftar Sekolah Menengah Pertama Negeri yang tersedia untuk masing-masing Kecamatan. Namun setelah melihat daftar bahwa setiap kecamatan memiliki ketersediaan Sekolah Menengah Pertama Negeri yang berbeda-beda. Zona A dengan delapan Kecamatan memiliki 22 Sekolah Menengah Pertama Negeri. Zona B dengan sepuluh Kecamatan memiliki 19 Sekolah Menengah Pertama Negeri. Zona C dengan lima

Kecamatan memiliki 14 Sekolah Menengah Pertama Negeri. Zona dengan tujuh Kecamatan 20 Sekolah Menengah Pertama. Dengan melihat data tersebut terlihat bahwa Zona A dengan delapan Kecamatan memiliki ketersediaan Sekolah Menengah Pertama Negeri lebih banyak dibandingkan dengan Zona lainnya.

Kebijakan berkaitan erat dengan implementasi, ketika kebijakan telah selesai dan ditetapkan untuk melihat apakah kebijakan tersebut berhasil atau tidak dapat diketahui dari implementasinya. Menurut Lester dan Stewart Jr (2000:14) implementasi merupakan suatu proses dan suatu hasil. Keberhasilan dari sebuah kebijakan dapat dilihat dari bagaimana kebijakan itu implementasikan dan apakah proses implementasi itu mampu mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Kebijakan zonasi ini diberlakukan dengan tujuan untuk pemerataan pendidikan baik dalam segi kualitas maupun sarana dan prasarana, mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga, peningkatan kualitas pendidikan dan menghilangkan label sekolah favorit dan tidak favorit. Namun dalam pengimplementasiannya masih menuai kontroversi di kalangan masyarakat.

Hal ini dibuktikan pada tahun 2019 terjadi aksi yang dikutip dari antaranews rabu, 3 Juli 2019 "Puluhan Ortu Murid Demo Soal Zonasi PPDB di Balai Kota Bandung" dari berita bahwa sebagian demonstran merupakan orang tua dari siswa yang tidak tertampung di SMP Negeri maupun swasta dan masyarakat yang menjadi korban dari kebijakan zonasi berada di wilayah domisili tidak terdapat sekolah negeri. Hal ini membuktikan bahwa masih ada ketidakmerataan pendidikan.

Melihat hal tersebut peneliti ingin melihat lebih dalam terkait implementasi kebijakan zonasi di Kecamatan Bandung Wetan dengan menggunakan dimensi implementasi yang dikemukakan oleh Richard E Matland (1995). Hal ini karena peneliti melihat adanya fenomena sebagai berikut:

1. Ketepatan kebijakan, dengan melihat tujuan awal dari kebijakan zonasi yang masih belum tercapai dilihat dari tujuan awal

zonasi untuk pemerataan ketersediaan sekolah disetiap wilayahnya belum tercapai, bahwa setiap kecamatan memiliki ketersediaan sekolah yang berbeda-beda.

2. Ketepatan pelaksana, dengan melihat aktor dari implementasi kebijakan zonasi apakah sudah menjalin kerjasama dengan baik atau belum dari pihak dinas pendidikan sebagai satuan kerja perangkat daerah dan sekolah sebagai tempat yang dipilih dan membuka penerimaan peserta didik baru.
3. Ketepatan sasaran, dengan melihat implementasi kebijakan zonasi dengan target yang belum sesuai. Hal ini terlihat dari masih terdapat ketidaksesuaian keperuntukkan sekolah menengah pertama negeri yang berada di Kecamatan Bandung Wetan.
4. Ketepatan lingkungan dari implementasi kebijakan zonasi yang terlihat masih adanya ketimpangan antar wilayah dimana ketersediaan sekolah menengah pertama tidak sesuai dengan kondisi wilayahnya.

## B. PEMBAHASAN

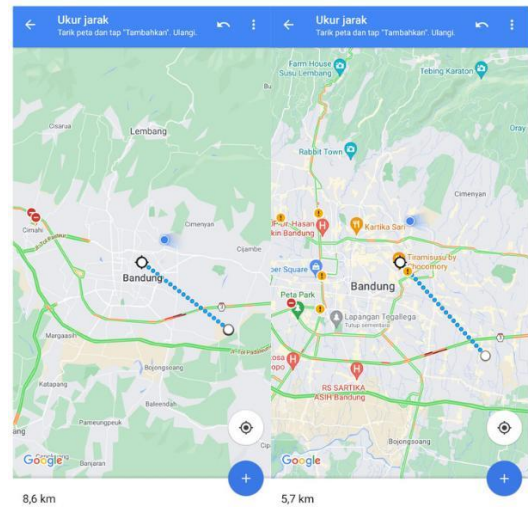
Pada dasarnya implementasi sebuah kebijakan ini dilakukan untuk mencapai tujuan yang sebelumnya sudah ditetapkan tidak kurang dan tidak lebih. Dalam implementasi kebijakan zonasi sebagai jalur penerimaan peserta didik baru ini memang sudah dilaksanakan oleh pihak sekolah sesuai dengan aturan yaitu Peraturan walikota Bandung No.57 Tahun 2021 dan petunjuk teknis pelaksanaan PPDB tahun 2021 dari Dinas Pendidikan Kota Bandung, tetapi tetap saja dalam implementasinya peneliti masih menemukan beberapa fenomena yang tidak sesuai dengan teori analisis yang digunakan. Hal ini peneliti peroleh dari hasil wawancara yang telah dilakukan kepada SMP Negeri yang berada di Kecamatan Bandung Wetan, Dinas Pendidikan Kota Bandung, dan Perwakilan orang tua siswa. Selain itu, di peroleh dari hasil studi dokumen baik berbentuk dalam aturan, data-data, penelitian terdahulu, maupun dari dokumen lainnya seperti media sosial.

### Analisis Implementasi Kebijakan Zonasi

Hasil penelitian ini menjelaskan terkait Implementasi Kebijakan Zonasi Jenjang Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Bandung

Wetan Kota Bandung. Didalamnya terdapat empat sekolah menengah pertama negeri yaitu SMPN 7 Bandung, SMPN 14 Bandung, SMPN 40 Bandung, dan SMPN 44 Bandung, dengan menggunakan teori implementasi yang dikemukakan oleh Richard E Matland (1995) yang terdiri dari empat dimensi yaitu ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksana, ketepatan sasaran, dan ketepatan lingkungan. Adapun uraian dari penelitian ini yang akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Ketepatan kebijakan SMP Negeri yang berada di Kecamatan Bandung Wetan dalam implementasi Kebijakan zonasi di Kecamatan Bandung Wetan benar mengacu pada Perwal No. 57 Tahun 2021 yang sudah ditetapkan sesuai dengan karakteristik peraturan yaitu oleh Wali Kota Bandung yang selanjutnya Dinas Pendidikan Kota Bandung sebagai satuan kerja perangkat daerah yang bertanggungjawab dalam melaksanakan urusan di bidang pendidikan. Selanjutnya, Zonasi memiliki empat tujuan yaitu 1) Untuk tujuan pemerataan pendidikan dapat dikatakan belum tercapai dengan baik karena masih adanya ketimpangan antara jumlah SD Negeri 274 sekolah dan SMP Negeri 75 sekolah, jumlah lulusan SD Negeri dan Swasta tahun 2020 36.268 siswa dan daya tampung SMP Negeri di Kota Bandung tahun 2020 hanya menampung 17.216 siswa. 2) Untuk mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga di Kecamatan Bandung Wetan sudah tercapai dengan baik tetapi di sisi lain masih terdapat beberapa yang jaraknya melebihi ketentuan dalam perwal jarak tidak boleh melebihi 3.000 meter atau 3 kilometer namun pada implementasinya di SMP Negeri di Kecamatan Bandung Wetan masih terdapat domisili siswa yang melebihi ketentuan seperti yang diukur dengan google maps tersebut yang merupakan hasil hitung peneliti dari domisili rumah siswa ke sekolah.



Gambar 2

Hal tersebut disebabkan oleh Kecamatan Bandung Wetan yang merupakan wilayah yang sedikit penduduk namun memiliki ketersediaan SMP Negeri yang lebih banyak dibandingkan yang lainnya maka sekolah yang berada di Kecamatan Bandung Wetan terus memperlebar cakupan jaraknya hingga kuota dari zonasi terpenuhi. 3) Untuk peningkatan kualitas pendidikan dapat dikatakan belum tercapai dengan baik karena dari empat SMP Negeri yang berada di Kecamatan Bandung Wetan tiga sekolah menyatakan adanya penurunan kualitas sekolah yang berpengaruh terhadap kegiatan belajar mengajar dan satu sekolah menyatakan adanya pengaruh terhadap kualitas belajar. 4) Untuk menghilangkan label sekolah favorit dan non-favorit dapat dikatakan sudah tercapai dengan baik.

2. Ketepatan pelaksana 1) Dinas Pendidikan Kota Bandung sudah menjalankan perannya dengan baik melakukan sosialisasi baik terhadap pihak sekolah yang dilakukan secara langsung di Dinas Pendidikan Kota Bandung maupun terhadap pihak orang tua calon siswa yang dilakukan secara online melalui media-media sosial dan juga melakukan kolaborasi dengan Dinas Kependudukan dan Percatatan Sipil dan Dinas Komunikasi dan Informatika. 2) Sekolah Menengah Pertama Negeri yang berada di Kecamatan Bandung Wetan sudah berperan dengan baik yang dibuktikan dengan pembuatan penitia

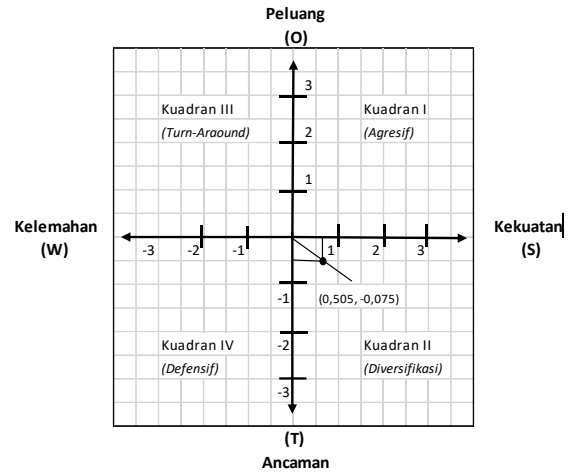
penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru untuk bertugas dan bertanggung jawab dibentuk dengan ditunjuk langsung oleh Kepala Sekolah sebagai kepala satuan pendidikan di sekolah sesuai dengan perwal.

3. Ketepatan sasaran pertama, melihat indikator kesiapan target dapat dikatakan belum tercapai dengan baik karena masih adanya orang tua calon siswa yang belum memahami terkait penerimaan peserta didik. Kedua, indikator kesesuaian target keperuntukkan dapat dikatakan belum tercapai dengan baik karena dari data yang diperoleh keperuntukkan SMP Negeri yang tertera didalam perwal untuk Kecamatan Bandung Wetan namun dalam implementasinya hanya sedikit siswa jalur zonasi yang berasal dari Kecamatan Bandung Wetan. Ketiga, indikator intervensi kebijakan dapat dikatakan kebijakan zonasi Kota Bandung yang mengacu pada Peraturan Walikota Bandung No. 57 Tahun 2021 ini merupakan kebijakan yang memperbaharui kebijakan sebelumnya tanpa adanya tumpang tindih antar kebijakan lainnya.
4. Ketepatan lingkungan dapat dikatakan belum tercapai dengan baik karena masih terdapat ketidaksesuaian antara kondisi wilayah dan ketersediaan sekolah menengah pertama negeri yaitu Kecamatan Bandung Wetan wilayah sedikit penduduk dibandingkan wilayah lainnya dengan jumlah penduduk 37.970 (BPS, 2019) dan penduduk pada umur 10-14 tahun hanya 2.766 (BPS,2019) namun memiliki ketersediaan Sekolah Menengah Pertama Negeri lebih banyak dibandingkan dengan yang lainnya. Selain itu, memang pada dasarnya pembangunan yang dilakukan di Kota Bandung ini tidak merata pada setiap wilayahnya hanya melihat wilayah yang kosong saja tanpa mempertimbangkan kondisi setiap wilayahnya.

#### Strategi Implementasi Kebijakan

Strategi ini dihasilkan dari hasil perhitungan yang sudah dilakukan oleh peneliti dengan pembobotan yang diberikan oleh informan yang sudah dilakukan wawancara sebelumnya. Dalam perhitungan menghasilkan skor Kekuatan

(*Strength*) sebesar 1,695 dan jumlah skor Kelemahan (*Weakness*) sebesar 0,685. skor Peluang (*Opportunity*) sebesar 1,02 dan jumlah skor Ancaman (*Threat*) sebesar 1,17.



Gambar 3 Hasil Olahan Peneliti, 2021

#### C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- 1) Implementasi kebijakan zonasi jenjang sekolah menengah pertama di Kecamatan Bandung Wetan dengan dianalisis dari empat dimesi. Pertama, ketepatan kebijakan dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik dari segi karakter kebijakan dan pembuatan kebijakan yang sudah sesuai. Namun jika melihat tujuannya masih terdapat beberapa tujuan yang belum tercapai yaitu pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan. Kedua, ketepatan pelaksana dapat dikatakan sudah tercapai dengan baik hal ini dibuktikan dengan pelaksana Dinas Pendidikan Kota Bandung dan SMP Negeri yang berada di Kecamatan Bandung Wetan sudah menjalankan perannya dengan baik. Ketiga, ketepatan sasaran dapat dikatakan belum tercapai dengan baik hal ini dilihat dari ketidaksesuaian target yang tertera dalam Perwal No. 57 Tahun 2021 dan masih terdapat beberapa orang tua siswa yang kurang memahami terkait kebijakan zonasi terutama pendaftaran

penerimaan peserta didik baru. Keempat, ketepatan lingkungan dapat dikatakan belum tercapai dengan baik karena mengingat masih terdapat ketimpangan di setiap daerahnya antara kondisi wilayah dan ketersediaan sekolah menengah pertama negeri.

- 2) Strategi yang dirumuskan dalam penelitian dihasilkan dari penelitian ini adalah strategi ST (*Strength - Threat*) yaitu dengan memanfaatkan kekuatan untuk menghindari ancaman atau disebut dengan strategi diversifikasi. Strategi-strategi alternatif tersebut yaitu: 1) Pembuatan peraturan dengan adanya kembali kuota untuk jalur akademik, Membuat peraturan dengan memberi kembali jalur akademik, 2) Intensifikasi sosialisasi pada masyarakat tidak hanya dengan media-media sosial, 3) Pengkajian dan evaluasi kembali Perwal No. 57 Tahun 2021, khususnya tentang ketentuan yang menyangkut sasaran sekolah dan siswanya.

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian tentang strategi implementasi kebijakan zonasi jenjang sekolah menengah pertama di Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung untuk dapat mengimplementasikan strategi yang telah peneliti rumuskan sebagai masukan yang dapat dipertimbangkan untuk memperbaiki pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun selanjutnya maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan Kota Bandung sebagai satuan kerja perangkat daerah yang bertugas menyelenggarakan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru agar melakukan pengkajian dan evaluasi kembali terkait Peraturan Walikota yang mengatur tentang penerimaan peserta didik baru diharapkan agar memberikan kembali kuota khusus untuk jalur akademik.
2. Dinas Pendidikan Kota Bandung sebagai satuan kerja perangkat daerah yang bertugas menyelenggarakan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru agar melakukan pengkajian dan evaluasi kembali terkait Peraturan Walikota yang

mengatur tentang penerimaan peserta didik baru terkait pembagian zona dan ketersediaan sekolah, karena masih adanya ketidaksesuaian antara kondisi wilayah dan ketersediaan sekolah. Sebagai studi kasus Kecamatan Bandung Wetan dengan ketersediaan SMP Negeri lebih banyak dibanding kecamatan lain selain dapat terjadinya ketidaksesuaian target dalam perwal dan jarak yang akan melebihi aturan untuk meminimlasir hal tersebut dalam pembagian zona beberapa SMP Negeri yang berada di Kecamatan Bandung Wetan dimasukan untuk zona kecamatan sekitarnya yang lebih memerlukan mengingat Kecamatan Bandung Wetan merupakan wilayah sedikit penduduk.

3. SMP Negeri dan Dinas Pendidikan Kota Bandung dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebagai orang tua siswa selain dengan media sosial perlu melakukan sosialisasi dengan infografis yang menarik, singkat, padat, dan jelas untuk di share melalui *whatsapp grup* orang tua siswa, tidak hanya dilakukan oleh SMP saja tetapi SD agar orang tua siswa ketika akan mendaftarkan anaknya sudah memahami bagaimana mekanisme dan ketentuan lainnya.

#### REFERENSI

- Anderson, J. 1979. *Public Policy-Making*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Anggito, A., & Setiawan, J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Kabupaten Sukabumi: CV Jejak.
- ANATARANEWS. 2019. Puluhan ortu murid demo soal zonasi PPDB di Balai Kota Bandung <https://www.antaraneews.com/berita/939234/puluhan-ortu-murid-demo-soal-zonasi-ppdb-di-balai-kota-bandung>
- Azhari, A., & Suryanef, S. 2019. Pelaksanaan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2019/2020 di Kota Padang. *Journal of Civic Education*, Vol 2 (5), 390–396

- Badan Pusat Statistik. (2017). Kecamatan Coblong dalam Angka 2017. BPS Kota Bandung
- Badan Pusat Statistik. 2018. Kecamatan Cidadap dalam Angka 2018. BPS Kota Bandung
- Badan Pusat Statistik. 2018. Kecamatan Sukasari dalam Angka 2018. BPS Kota Bandung
- Badan Pusat Statistik. 2019. Kecamatan Bandung Wetan dalam Angka 2019. BPS Kota Bandung
- Badan Pusat Statistik. 2019. Kecamatan Cibeunying Kaler dalam Angka 2019. BPS Kota Bandung
- Badan Pusat Statistik. 2019. Kecamatan Cibeunying Kidul dalam Angka 2019. BPS Kota Bandung
- Badan Pusat Statistik. 2019. Kecamatan Sukajadi dalam Angka 2019. BPS Kota Bandung
- Badan Pusat Statistik. 2019. Kecamatan Sumur Bandung dalam Angka 2019. BPS Kota Bandung
- Chandler, Ralph C., dan Plano, Jack C. 1988. *The Public Administration Dictionary*. John Wiley & Sons.
- Dinas Pendidikan. 2020. E-Book Panduan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Kota Bandung Tahun 2020. DISDIK Kota Bandung
- Denzin, N.K. 1978. *The Research Act: A Theoretical Introduction in Sociological Methods*. New York: McGraw-Hills.
- Dye, Thomas R. 1978. *Understanding Public Policy*. Prentice Hall, N.J: Englewood Cliffs
- Fatimah, F. N. D. 2020. Teknik Analisis SWOT Pedoman Menyusun Strategi yang Efektif dan Efisien serta Cara Mengelola Kekuatan dan Ancaman. Yogyakarta: ANAK HEBAT INDONESIA.
- Handani, M. S., & Frinaldi, A. 2020. Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru dengan Sistem Zonasi pada SMP Negeri di Kota Padang. *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, Vol 2 (3), 73-86.
- IDN Times Jabar (2020) Pendidikan Kota Bandung belum Merata, Masalah PPDB Masih Itu-itunya Saja <https://jabar.idntimes.com/news/jabar/azzis-zilkhairil/pendidikan-kota-bandung-belum-merata-masalah-ppdb-masih-itu-itu-saja/4>
- Indiahono, D. 2017. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: GAVA MEDIA.
- Iskandar, J. 2012. *Kapita Selekta teori Administrasi Negara*. Bandung: Puspa
- Kompas. 2019. Wali Kota Bandung Berhentikan Kadisdik Pencetus Sistem Zonasi PPDB <https://regional.kompas.com/read/2019/01/29/20184781/wali-kotabandungberhentikan-kadisdik-pencetus-sistem-zonasi-ppdb>
- Langkai, J. E. 2020. *Kebijakan Publik*. Malang: CV. Seribu Bintang.
- Lester, J. P., & Stewart, J. 2000. *Public Policy: An Evolutionary Approach (Second Ed)*. Wadsworth.
- Moleong, L. J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya,
- Mulyadi, D. 2010. *Membidik Jalan menuju Public Trust*. Bandung: STIA LAN Bandung Press.
- Mulyadi, D. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: ALFABETA.
- Munadi, M., & Bernawi. 2011. *Kebijakan Publik di Bidang Pendidikan*. Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA.
- Perdana, N. S. 2019. Implementasi Ppdb Zonasi Dalam Upaya Pemerataan Akses Dan Mutu Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Glasser*, Vol 3 (1), 78.
- Pradewi, G. I., & Rukiyati, R. 2019. Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Perspektif Pendidikan. *Jurnal Manajemen Dan Supervisi Pendidikan*, Vol 4 (1), 28-34.

- Purwanti, D., Irawati, I., Adiwisastra, J., & Bekti, H. 2019. Implementasi Kebijakan
- Rangkuti, F. 2013. Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis. Jakarta:Gramedia Pustaka Utama.
- Rangkuti, F. 2015. Personal SWOT Analysis Peluang di Balik Setiap Kesulitan. Jakarta:Gramedia Pustaka Utama.
- SMP Negeri 7 Bandung. 2021. Domisili Penerimaan Siswa Jalur Zonasi. SMPN 7 Kota Bandung
- SMP Negeri 14 Bandung. 2021. Domisili Penerimaan Siswa Jalur Zonasi. SMPN 14 Kota Bandung
- SMP Negeri 44 Bandung. 2021. Domisili Penerimaan Siswa Jalur Zonasi. SMPN 44 Kota Bandung
- Sore, U. B., & Sobirin. 2017. Kebijakan Publik. Makasar:CV SAH MEDIA.
- Sudjana, Nana. 2004. Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. Bandung:Remaja Rosdakarya.
- Thoha, M. 2012. Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara. Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Wahab, S. A. 2010. Pengantar Analisis Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta:Rineka Cipta.